



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

SELASA, 7 AGUSTUS 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejari Masih Tunggu Jawaban Kemendagri

Kasus Dana BK DPPKAD Kota

RBI, BENGKULU - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, I Made Sudarmawan SH, MH mengungkapkan, untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi pembayaran dana Beban Kerja (BK) pada DPPKAD Kota Bengkulu, hingga saat ini pihaknya masih menunggu jawaban hasil koordinasi dengan biro hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Belum, kita masih menunggu jawaban dari Kemendagri terkait dengan aturan pengucuran dana BK tersebut," imbuhnya Senin, (6/8). Dijelaskan, dalam penanganan perkara ini, keterangan saksi dan barang bukti sudah bisa dinyatakan cukup meski pun ada beberapa orang yang masih dipanggil untuk diperiksa ulang sebagai saksi. Jika jawaban dari Kemendagri tak kunjung ada, mau tidak mau dalam dalam waktu dekat ini, penanganan perkara tersebut akan diekspos ditingkat pimpinan. Bagaimana hasil eksposnya nanti akan disampaikan ke media.

"Rencananya dalam minggu ini kita akan melakukan ekspos di Kejati untuk perkara dana BK ini. Nantilah kita lihat hasilnya seperti apa. Yang jelas kita sudah ada sikap dalam penanganan perkara ini," jelasnya. Untuk diketahui, pembayaran tunjangan dana BK tahun 2015 diduga menyalahi aturan perwal nomor 36. Sesuai dengan

perwal nomor 12 tahun 2014 jabatan Kadis mendapatkan tunjangan dana BK Rp 6,5 juta, kemudian pada Perwal Nomor 36 tahun 2015 menjadi Rp 12 juta. Jabatan sekretaris dan Kabid pada tahun 2014 mendapatkan tunjangan dana BK Rp 5 juta, di tahun 2015 menjadi Rp 9 juta. Jabatan Kasi tahun 2014 mendapat tunjangan dana BK Rp 3 juta ditahun 2015 mendapatkan Rp 5 juta. Jabatan bendahara ditahun 2014 menerima dana BK Rp 3 juta ditahun 2015 menjadi Rp 4,5 juta.

Staf ASN tahun 2014 menerima dana BK Rp 1,5 juta, ditahun 2015 Rp 3,5 juta, dan honorer pada tahun 2014 menerima dana BK Rp 1 juta ditahun 2015 mendapatkan Rp 3 juta ditahun.

Dana BK yang harus dikembalikan ASN dan honorer yang menerima dana BK itu adalah selisih kenaikan tunjangan dana BK dari tahun 2014 ke tahun 2015. Pembayaran hanya berlangsung dua bulan, tetapi di dalam tanda-tangan penerimaan, ASN dan honorer tersebut harus tanda-tangan menerima tunjangan selama 7 bulan. Total semua anggaran Rp 1,8 Miliar Rp 200 Juta digunakan untuk membayar dana BK. Sesuai dengan penjelasan M Sofyan mantan kepala DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015. (ide)